

Daftar Pustaka

- Abonita, R. (2023). Rumoh Geudong: 'Saya disetrum dan digantung dengan kaki di atas', trauma anak muda Aceh. *BBC News Indonesia*. Diakses 15 Januari 2024 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-65845473>
- Amnesty Internasional. (2023). Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Perlu Diikuti Pengungkapan Kebenaran dan Penghukuman Pelaku. *Amnesty.id*. Diakses 22 Desember 2023 melalui <https://www.amnesty.id/penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-perlu-diikuti-pengungkapan-kasus-dan-pelurusan-sejarah/>.
- Amnesty International. (1994). Indonesia: Power and Impunity: Human Rights under the New Order. ASA 21/017/1994. Diakses 23 Juli 2024 melalui <https://www.refworld.org/reference/countryrep/amnesty/1994/en/91506>.
- Amnesty International. (2023). Setengah hati, penyelesaian non-yudisial kasus pelanggaran HAM berat. *Amnesty.id*. Diakses 23 Januari 2024 melalui <https://www.amnesty.id/jokowi-kick-off-penyelesaian-non-yudisial-kasus-pelanggaran-ham-berat-di-aceh-pelaku-tetap-harus-diadili/>
- Amnesty.id. (2021). Apa itu pelanggaran HAM berat? *Amnesty.id*. Diakses 22 Desember 2023. <https://www.amnesty.id/apa-itu-pelanggaran-ham-berat/>.
- Arief, A., M. (2023). Daftar Bantuan Untuk Korban HAM Berat: Beasiswa hingga Renovasi Rumah. *Katadata.co.id*. Diakses 15 Juni 2024. <https://katadata.co.id/berita/nasional/64957d80b9004/daftar-bantuan-untuk-korban-ham-berat-beasiswa-hingga-renovasi-rumah>
- Ashri, A., M. (2023). Kontestasi Aktor seputar Inisiasi Mekanisme Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Studi Sosio-Legal terhadap Tim PPHAM. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 3(1).
- Astuti, T., I., Ikramatoun, S., Nusuary, F., M. (2022). Survival Perempuan Single Parent Korban Rumoh Geudong Pasca Konflik di Desa Billie Aroen Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 7(4).
- BBC Indonesia. (2022). Setelah 17 tahun perdamaian di Aceh: 'Jangankan pulih, diingat pun tidak'. *BBC News Indonesia*. Diakses 22 Desember 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04kjell98o>.
- BBC Indonesia. (2023). Presiden Jokowi luncurkan penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di 'Rumah Geudong' di Pidie, Aceh, 27 Juni - Keluarga korban: 'Penyelesaian yudisial mimpi besar kami'. Diakses 23 Februari 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1znxvxzggo>

- BBC News Indonesia. (2022). Sidang perdana kasus Paniai: Korban anggap 'penghinaan', pegiat sebut 'sandiwar hukum'. *BBC News Indonesia*. Diakses 10 Juni 2024 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c10p7389pipo>
- BBC News Indonesia. (2022). Terdakwa kasus Paniai Berdarah divonis bebas, Komnas HAM desak Jaksa Agung ajukan kasasi. *BBC News Indonesia*. Diakses 27 Juni 2024 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjq7zx022y2o>
- BBC News Indonesia. (2023). Jokowi perintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait pulihkan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu, pegiat: 'Korban seakan penerima bansos semata'. *BBC Indonesia*. Diakses 15 Desember 2023 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n5x7v3gz2o>
- BBC News Indonesia. (2023). Presiden Jokowi luncurkan program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagian korban menolak. *BBC Indonesia*. Diakses 15 Desember 2023 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy0j2vz8l29o>
- Clarke, R. (2008). *Kasus Keterlibatan? Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh*. Hivos: Open Society Institute (OSI).
- CNN Indonesia. (2022). Mahfud MD: Komnas HAM-Kejagung tak sinkron soal pelanggaran HAM berat. *CNN Indonesia*. Diakses 22 Juni 2023 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220127143243-12-752024/mahfud-md-komnas-ham-kejagung-tak-sinkron-soal-pelanggaran-ham-berat>.
- CNN Indonesia. (2023). Sejarah Kasus HAM Berat Rumoh Geudong dan Janji Pemulihan Hak Korban. *CNN Indonesia*. Diakses 23 Januari 2024 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230627094716-20-966949/sejarah-kasus-ham-berat-rumoh-geudong-dan-janji-pemulihan-hak-korban>.
- Daud, B., S. & Jaya, N., S., P. (2019). *Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia*. *Pandecta*, 13(2). 83-90.
- De Masinus Arus, Y. (2003). *The Right to Know the Truth, Kerangka Normatif Mengungkap Kebenaran. Dalam Pencarian Keadilan Di Masa Transisi*. Jakarta: Elsam.
- Dewan HAM PBB. (2006). Commission on Human Rights Report on The Sixty-Second Session. file:///C:/Users/user/Downloads/E_2006_23_E_CN.4_2006_122-EN.pdf
- Dewan HAM PBB. (2012). Human rights and transitional justice. <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/g12/174/47/pdf/g1217447.pdf>
- Drexler, E. 2010. *The Failure of International Justice in East Timor and Indonesia. Dalam Transitional Justice: Global Mechanisms and Local Realities After*

- Genocide and Mass Violence*, edited by A. Laban Hinton. Hal. 49–66. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Dwyer, L., & Santikarna, D. (2007). *Speaking from the Shadows: Memory and Mass Violence in Bali. Dalam After Mass Crime: Rebuilding States and Communities*, edited by B. Pouligny, S. Chesterman, dan A. Schnabel. Hal. 190–214. Tokyo: United Nations University Press.
- Eddyono, S., W., dan kawan-kawan. (2020). *Gerakan Advokasi Legislasi untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Law, Gender and Society Study Centre. Fakultas Hukum UGM dan Migrant Care.
- ELSAM. (2012). *Kertas Posisi Keadilan Transisional: Seri #3 Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Mendorong inisiatif masyarakat sipil, memastikan negara bertanggungjawab*. Jakarta: ELSAM.
- Firdaus. (2022). Pelanggaran HAM Berat di Pos Sattis Rumoh Geudong yang Tak Kunjung Memiliki Kepastian Hukum. *Sinarpidie.co*. Diakses 23 Januari 2024. <https://sinarpidie.co/news/pelanggaran-ham-berat-pos-sattis-rumoh-geudong-yang-tak-kunjung-memiliki-kepastian-hukum/index.html>
- Firdaus. (2024). Pekerja Proyek Temukan Tulang-tulang Korban *Extra Judicial Killing* di Kompleks Rumoh Geudong. *Sinarpidie.co*. Diakses 27 Maret 2024. <https://sinarpidie.co/news/pekerja-proyek-temukan-tulang-tulang-korban-extra-judicial-killing-di-kompleks-rumoh-geudong/index.html>
- Gultom, B. (2010). *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, F. (2023). Pemerintah Beri 'Paket Jumbo' Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat. *KumparanNEWS*. Diakses 10 Januari 2024 melalui <https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-beri-paket-jumbo-pemulihan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-20epeUWojdz/full>
- Hadi, F. (2023). Pemerintah Beri 'Paket Jumbo' Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat. *KumparanNEWS*. Diakses 10 Januari 2024 melalui <https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-beri-paket-jumbo-pemulihan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-20epeUWojdz/full>
- Hanifah, L. (2015). Komnas HAM: Ada perbedaan persepsi penyelesaian pelanggaran HAM berat. *Mahkamah Konstitusi RI*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11993>. Diakses 23 Juni 2023.
- Hanum, Z. (2023). Sejarahwan: Rumoh Geudong Termasuk Situs Sejarah Aceh. *Media Indonesia*. Diakses 30 Februari 2024. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/592774/sejarahwan-rumoh-geudong-termasuk-situs-sejarah-aceh#google_vignette

- Hayner, P. (2011). *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions* (2nd ed). New York: Routledge.
- Ilman, A., N. (2023). Tipu Muslihat Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. *PBHI*. Diakses 15 Januari 2024 melalui <https://pbhi.or.id/tipu-muslihat-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-janji-manis-fasilitas-kejahatan-tidak-pernah-diusut-tuntas-pelanggaran-keberulangan-dan-impunitas/>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Jafaruddin. (2023). Tim PKPHAM Audiensi dengan Bupati Aceh Utara, Juga Tinjau/Cocokkan Data Korban Tragedi Simpang KKA. *Serambinews.com*. Diakses 25 Juni 2024 melalui <https://aceh.tribunnews.com/2023/05/17/tim-pkpham-audiensi-dengan-bupati-aceh-utara-juga-tinjaucocokkan-data-korban-tragedi-simpang-kka>
- Jalaludin, E. (2023). Rumoh Geudong Dirobuhkan Menjelang Pengumuman Pelaksanaan Rekomendasi PPHAM. *KBR Aceh*. Diakses 30 Februari 2024. <https://kbr.id/berita/nasional/rumoh-geudong-dirobuhkan-menjelang-pengumuman-pelaksanaan-rekomendasi-ppham>
- Kasim, I., Riyadi, T. (2003). *Kebenaran keadilan pertanggungjawaban pelanggaran HAM di masa lalu*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Kimura, E. (2015). The Struggle for Justice and Reconciliation in Post-Suharto Indonesia. *Southeast Asian Studies*, 4(1). Hal. 73–93.
- Komnas HAM RI. (2018). Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh: Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya. Diakses 15 Januari 2024. komnasham.go.id/n/608
- Komnas HAM RI. (2022). Komnas HAM: TPP-HAM Tidak Menganulir Kewenangan Penyelidikan Komnas HAM. Diakses 15 Januari 2024. komnasham.go.id/n/2255.
- Komnas HAM RI. (2023). Komitmen Komnas HAM pulihkan hak korban pelanggaran HAM yang berat. Diakses 15 Januari 2024. komnasham.go.id/n/2354

- KontraS Aceh. (2022). *KontraS Aceh Kritisi Hadirnya Tim PPHAM: Dengan Penyelesaian Non-Yudisial, Apakah Hak Korban Akan Terpenuhi?* Diakses 10 Desember 2023 melalui <https://kontrasaceh.or.id/kontras-aceh-kritisi-hadirnya-tim-ppham-dengan-penyelesaian-non-yudisial-apakah-hak-korban-akan-terpenuhi/>
- Laksmiana, E. (2019). Reshuffling the Deck? Military Corporatism, Promotional Logjams, and Post-Authoritarian Military Reform in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia* 49(5).
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). *Prinsip-Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius terhadap Hukum Humaniter Internasional* (Resolusi Majelis Umum PBB 60/147). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation>
- McEvoy, K. (2007). Beyond Legalism: Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice. *Journal of Law and Society*. 34(4). Hal. 411-440.
- McGregor, K. & Setiawan, K. (2019). Shifting from International to “Indonesian” Justice Measures: Two Decades of Addressing Past Human Rights Violations. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Muzakar, Q. dkk. (2011). *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.
- Nurhayati, N. (2016). Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2).
- Pebrianto, F. (2022). Alasan Jokowi Bentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat. *Tempo.co*. Diakses 10 Desember 2023 melalui <https://nasional.tempo.co/read/1623650/alasan-jokowi-bentuk-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat>
- Prasetyo, T., & Barakatullah, A., H. (2007). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purnamasari, D., D. (2022). Pemerintah Janji Kawal Implementasi Rekomendasi Tim PPHAM. *Kompas.id*. Diakses 15 Desember 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/29/pemerintah-janji-kawal-implementasi-rekomendasi-tim-ppham>

- Putra, H., R. (2023). Inilah 12 pelanggaran ham berat yang diakui presiden Jokowi. *Tempo.co*. Diakses 20 April 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1678970/inilah-12-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-presiden-jokowi>.
- Putra, M., Y. & Irwansyah. (2019). Penyelesaian Non-Yudisial Terhadap Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan. *Tanjungpura Law Journal*, 2(1).
- Radjab, S. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat di Era Pemerintahan Jokowi-Jk. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2).
- Rahayu, L., S. (2023). Alasan Rumoh Geudong Jadi Lokasi Kick-Off Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu. *Detik.com*. Diakses 10 Juni 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6795091/alasan-rumoh-geudong-jadi-lokasi-kick-off-penyelesaian-ham-berat-masa-lalu>
- Rahmany P, D. (2001). *Rumoh Geudong: Tanda luka orang Aceh*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Ramadhan, A. (2022). Jokowi resmi bentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran ham berat masa lalu, ini anggotanya. *Kompas.com*. Diakses 10 Januari 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/10564941/jokowi-resmi-bentuk-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa>.
- Razali, H. (2021). Hari HAM sedunia: Mengenang nasib tiga kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. *ACEHKINI*. Diakses 19 Desember 2023. <https://kumparan.com/acehkini/hari-ham-sedunia-mengenang-nasib-tiga-kasus-pelanggaran-ham-berat-di-aceh-1x5ED3Iw7Ol>.
- Rizal, J., G. (2023). Sejarah Rumah Geudong, Saksi Bisu Pelanggaran HAM Berat di Aceh. *Kompas.com*. Diakses 28 Februari 2024. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/06/23/192100682/sejarah-rumah-geudong-saksi-bisu-pelanggaran-ham-berat-di-aceh-?page=all>.
- Rohman, S., & Harkrisnowo, H. (2024). Resolving Serious Violations of Human Rights in Non-Judicial Mechanisms in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 2(02), 136–148.
- Santoso, B. (2018). Kewenangan jaksa agung dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat dihubungkan dengan prinsip negara hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 5(2). 482-500.
- Saymima & Firdaus. (2023). Apa yang Tersisa di Rumoh Geudong setelah Kunjungan Presiden Jokowi? *Sinarpidie.co*. Diakses 5 Juni 2024. <https://sinarpidie.co/news/apa-yang-tersisa-di-rumoh-geudong-setelah-kunjungan-presiden-jokowi/index.html>

- Saymima, C., & Zulkarnaen, D. (2023). Tim PPHAM Lakukan Validasi dan Data Korban Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya di Pidie. *Sinarpidie.co*. Diakses 27 Desember 2023 melalui <https://sinarpidie.co/news/tim-ppham-lakukan-validasi-dan-data-korban-rumoh-geudong-dan-pos-sattis-lainnya-di-pidie/index.html>
- Sekretariat Kabinet RI. (2023). Presiden Tegaskan Upaya Pemerintah Agar Pelanggaran HAM Berat Tidak Terjadi Lagi. *Setkab.go.id*. Diakses 18 Januari 2024. <https://setkab.go.id/presiden-tegaskan-upaya-pemerintah-agar-pelanggaran-ham-berat-tidak-terjadi-lagi/>
- Sharp, D., N. (2013). Interrogating The Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation Transitional Justice. *Harvard Human Rights Journal*, 26(1). Hal. 149–178.
- Situs Resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (www.kejaksaan.go.id)
- Spradley, J.P. 1979. *The Ethnographic Interview*. New York: Reinhart & Winston.
- Sriyana. (2014). Peran Komnas HAM dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. ELSAM.
- Sucipto, H., & Tohari, H. (2012), Penanganan Pelanggaran berat HAM Masa Lalu, Dalam Penyelesaian Pelanggaran berat HAM Masa Lalu. *Jurnal Dignitas*, 8(1).
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Suryarandika, R. (2022). Tim PPHAM Respons Nama-Nama Kontroversial di dalam Tim. *Republika*. Diakses 23 Mei 2024 melalui <https://news.republika.co.id/berita/riyfp6328/tim-ppham-respons-namanama-kontroversial-di-dalam-tim>
- Teitel, R., G. (2004). *Keadilan Transisi, Sebuah Tinjauan Analitis-Komprehensif. Terjemahan Elsam dari Transisional Justice*, Cetakan Pertama. Jakarta: Elsam.
- Thahara, F. (2023). Tragedi Rumoh Geudong: Membuka luka lama dalam sejarah pelanggaran HAM. *Kontras Aceh*. Diakses 7 Januari 2024. <https://kontrasaceh.or.id/tragedi-rumoh-geudong-membuka-luka-lama-dalam-sejarah-pelanggaran-ham/>
- Thea DA, A. (2022). LBH Banda Aceh: Keppres No.17 Tahun 2022 Preseden Buruk Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat. *Hukumonline.com*. Diakses 10 Januari 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-banda-aceh--keppres-no17-tahun-2022-preseden-buruk-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-berat-lt6357861a70612/>
- Thea DA, A. (2023). Menkopolhukum: Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Fokus Pada Korban. *Hukumonline.com*. Diakses 10 Januari

- 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkopolhukam--penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-fokus-pada-korban-lt6451f2b8eed4f/>
- Tim ELSAM. (2012). *Kertas Posisi Keadilan Transisional: Seri #3 Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Mendorong inisiatif masyarakat sipil, memastikan negara bertanggungjawab*. Jakarta: ELSAM.
- Tim ELSAM. (2022). Sekali lagi, Pemerintah Harus Segera Mengakui, Meminta Maaf, dan Menyelesaikan Berbagai Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Diakses 19 Januari 2024 melalui <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/sekali-lagi-pemerintah-harus-segera-mengakui-meminta-maaf-dan-menyelesaikan-berbagai-kasus-pelanggaran-ham-berat-di-masa-lalu-ambar-puspa-galuh>
- Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM). (2023). *Ringkasan Eksekutif SKP-HAM Sulteng*. Diakses 10 Januari 2024 melalui <https://skp-ham.org/3388/ringkasan-eksekutif-laporan-dan-rekomendasi-tim-ppham/>
- Trial International. (2006). “General Wiranto.” *Trial International*, May 2. Diakses 25 Juli 2024 melalui <https://trialinternational.org/latest-post/general-wiranto/>.
- Tumbo, A. (2020). Konsep *Transitional Justice* dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *PAULUS Law Journal*, 1(2).
- Utami, P., N. DKK. (2021). *Jalan Menuju Keadilan Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. Percetakan Pohon Cahaya. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI).
- Van Zyl, P. (2005). *Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies*. In A. Bryden & H. Hänggi (Eds.), *Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding*. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). Hal. 209–222. Diakses melalui <https://www.dcaf.ch/security-governance-post-conflict-peacebuilding>.
- Wardaya, M., K. (2007). Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Ujung Masa Transisi, dalam Artidjo Alkostar (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
- Wiratraman, R. H. P., Nugroho, A. B., Kurniawan, D., ... [et al.]. (2007). *Laporan Penelitian: Dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap mekanisme hukum dan akses keadilan korban bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Yanwardhana, E. (2023). Ini langkah Jokowi bereskan pelanggaran HAM berat masa lalu. *CNBC Indonesia*. Diakses 16 Januari 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230316121407-4-422257/ini-langkah-jokowi-bereskan-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu>.
- Zulkarnaen, D. (2023). [Bagian II] Farida dan Pengungkapan Pelanggaran HAM Berat di Rumoh Geudong. *Sinarpidie.co*. Diakses 19 Mei 2024 melalui <https://sinarpidie.co/news/bagian-ii-farida-dan-pengungkapan-pelanggaran-ham-berat-di-rumoh-geudong/index.html>
- Zulkarnaen, D. (2023). Tim Asistensi TPPHAM Bantah Korban Kekerasan Seksual Rumoh Geudong Berikan Keterangan di dalam Forum Sosialisasi Tim Tersebut. *Sinarpidie.co*. Diakses 4 Januari 2024 melalui <https://sinarpidie.co/news/tim-asistensi-tppham-bantah-korban-kekerasan-seksual-rumoh-geudong-berikan-keterangan-di-dalam-forum-sosialisasi-tim-tersebut/index.html>